
ARTICLE

Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Reza Agung Fernanda^{1*}. Rahayu Sulistiowati^{2*}. Susana Indriyati Caturiani^{3*}

^{1,2,3} *Administrasi Negara Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia*

How to cite: Fernanda, R.A., Sulistiowati, R., Caturiani, S.I., (2025). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. *Administrativa* (7)1.

Article History

Received: 24 November 2024

Accepted: 2 Desember 2024

Keywords:

Implementation, Family Hope Program Poverty

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a social protection program that provides cash assistance to Very Poor Households (RTSM) and RTSM family members are required to carry out the terms and conditions set out. Wonodadi Pekon, Gadingrejo District, Pringsewu Regency is one of the pekons implementing the family hope program. The number of KPM in Pekon Wonodadi is the highest in Gadingrejo District. However, the phenomenon that occurred was that the facilitators were less than optimal in carrying out their responsibilities and there were two changes in the PKH facilitators. This research aims to explain and analyze the Family Hope Program (PKH) is implemented in Pekon Wonodadi, Gadingrejo District, Pringsewu Regency. The method used is a qualitative approach with a descriptive type. The results of the research show that the implementation of PKH in Wonodadi village includes PKH social assistants as the implementer and involvement of village officials in finding residents who meet the criteria, there are P2K2 activities, and there are SOPs for implementing PKH. This is in accordance with Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. Obstacles in its implementation, such as a lack of responsibility for companions in carrying out their duties, a lack of coordination between Pekon officials, Puskesmas, and companions, as well as obstacles to routine meeting activities.

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial berupa pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan pengajuansyarat anggota keluarga RTSM wajib untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu adalah salah satu pekon yang menjadi pelaksana program keluarga harapan. Jumlah KPM di Pekon Wonodadi merupakan yang tertinggi se Kecamatan Gadingrejo. Namun, fenomena yang terjadi adalah kurang maksimalnya pendampingan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Pekon Wonodadi yaitu pendamping sosial PKH sebagai pelaksana dan keterlibatan aparat pekon dalam mencari warganya yang memenuhi kriteria, terdapat kegiatan P2K2, dan terdapat SOP dalam melaksanakan PKH. Hal

Kata Kunci:

Implementasi, Keluarga kemiskinan

Program Harapan,

Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

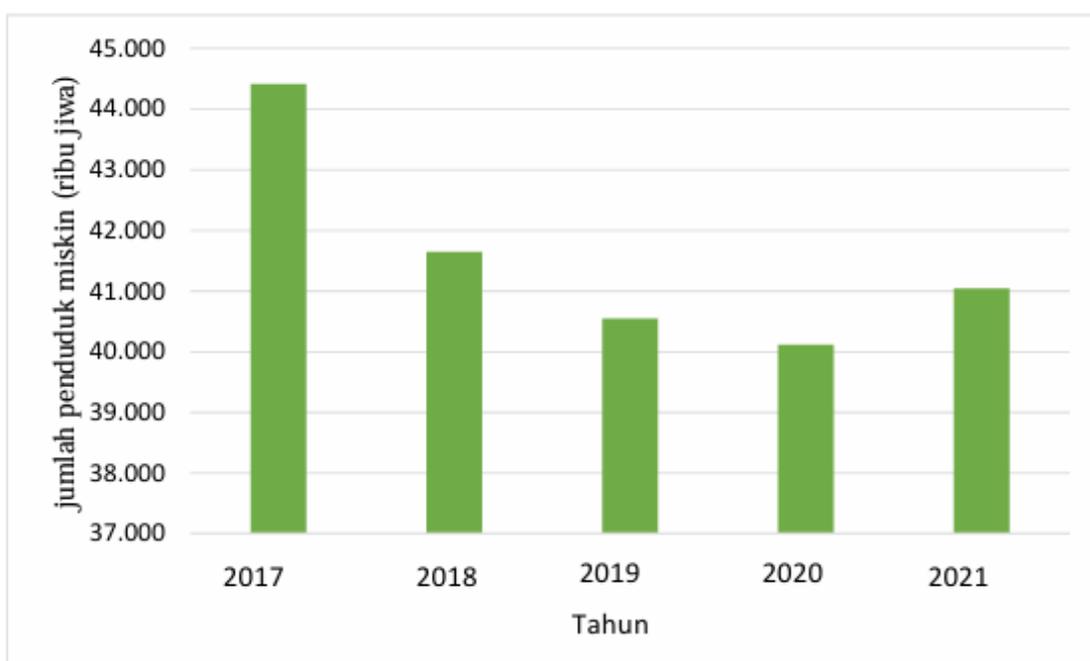
tersebut sudah sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Namun, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya koordinasi antara aparat pekon, Puskesmas, dan pendamping, serta kurang maksimalnya kegiatan P2K2.

A. Pendahuluan

Subandi dalam Purba (2021) pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan pada segala aspek kehidupan rakyat yang bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Pembangunan nasional merupakan proses yang dilaksanakan bertahap melalui segala aspek kehidupan masyarakat untuk merealisasikan tujuan nasional. Witjaksono dalam Purba (2021) proses pembangunan meliputi aspek sosial budaya, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan agar terselenggaranya kehidupan dan Negara yang maju dan demokratis sesuai dengan Pancasila. Di Indonesia kemiskinan merupakan masalah perekonomian yang selalu disorot. World Bank dalam Hendra (2010) Kemiskinan merupakan kondisi ketidaksanggupan dalam mencapai standar hidup minimal untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya Assegaf dalam Dicky (2020) kemiskinan adalah kondisi kurangnya pendapatan individu dalam mencukupi keperluan dasarnya untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Kemiskinan disebabkan kurangnya alat pemenuh keperluan dasar ataupun kesulitan dalam mengakses pendidikan maupun kurangnya lapangan pekerjaan (Assegaf, 2015). Kesenjangan ekonomi antara golongan masyarakat menengah ke atas dengan pendapatan rendah dan orang-orang yang tergolong di bawah garis kemiskinan adalah dua permasalahan yang sering ditemui di Negara berkembang maupun Negara maju. PKH berupa program perlindungan sosial yang dilakukan dengan membagikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat anggota keluarga RTS wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Kegiatan PKH juga dilaksanakan untuk memberikan dukungan atas upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium yang terdiri dari lima indikator yaitu, mengurangi angka penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, ekualitas gender, penurunan angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kematian ibu melahirkan. PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. PKH dilaksanakan sebagai pelaksana dari UU No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pemecahan dan Pengendalian Pembangunan yang berkeadilan dan Perpres No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Komponen bantuan PKH terbagi menjadi tiga yaitu: 1. Kesejahteraan ibu hamil/menyusui dan anak kecil berusia 0-6 tahun; 2. Pendidikan untuk anak sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat; dan 3. Kesejahteraan sosial bagi lansia serta penyandang disabilitas. Di Kabupaten Pringsewu kemiskinan dianggap sebagai permasalahan dalam proses pembangunan (LP2KD, 2021). Dari tahun 2017-2020 telah terjadi penurunan angka kemiskinan dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021, kenaikan angka kemiskinan disebabkan oleh dua hal yaitu 1) belum memiliki pekerjaan tetap, 2) penyebaran virus Covid-19 yang berimplikasi pada pemutusan hubungan kerja. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan melibatkan berbagai pihak serta keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (LP2KD, 2021). Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengimplementasikan program-program dibidang penanggulangan kemiskinan untuk terus

menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu. Penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan dengan banyak program, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut ini adalah jumlah penduduk miskin Kabupaten Pringsewu: virus Covid-19 yang berimplikasi pada pemutusan hubungan kerja. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan melibatkan berbagai pihak serta keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (LP2KD, 2021). Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengimplementasikan program-program dibidang penanggulangan kemiskinan untuk terus menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu. Penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan dengan banyak program, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut ini adalah jumlah penduduk miskin Kabupaten Pringsewu:

Grafik 1 Jumlah Penduduk Miskin Pringsewu



Sumber: BPS Pringsewu, 2021

Program PKH sudah dilaksanakan di berbagai daerah Kabupaten Pringsewu, salah satunya adalah di Kecamatan Gadingrejo. Kecamatan Gadingrejo terdiri atas 23 Pekon dan terdapat 4.116 KPM PKH. Berikut ini adalah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per Pekon di Kecamatan Gadingrejo:

Tabel 1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

No	Pekon	Jumlah KPM
1	Wonodadi	402
2	Tulung Agung	351
3	Gadingrejo	306
4	Blitarejo	304
5	Tegalsari	237
6	Bulurejo	228
7	Parerejo	225
8	Bulukarto	208
9	Kediri	185
10	Tambah Rejo	177
11	Wonosari	163
12	Mataram	155
13	Panjerejo	152
14	Gadingrejo utara	147
15	Yogyakarta	126
16	Gadingrejo timur	110
17	Wonodadi Utara	109
18	Wates Timur	107
19	Yogyakarta Selatan	104
20	Tambah Rejo Barat	92
21	Wates	77
22	Klaten	77
23	Wates Selatan	74

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2022

Jika dipahami tabel 1.1, bisa dilihat angka KPM di Pekon Wonodadi merupakan yang tertinggi diantara pekon lainnya. Program PKH di Pekon Wonodadi sudah dilaksanakan sejak awal dibentuknya program PKH yakni 2012 sampai dengan sekarang. Dengan jangka waktu yang sangat lama tersebut tetapi angka KPM di Wonodadi masih menjadi yang tertinggi sekecamatan Gadingrejo. Berdasarkan informasi yang didapatkan kendala yang dialami adalah terdapat pergantian pendamping PKH dan selama pergantian tersebut jarang sekali dilakukan pertemuan rutin KPM, jika ada pertemuan pun yang dilibatkan hanya ketua-ketua KPM sehingga menyebabkan KPM mengadu kepada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas_ Pekon Wonodadi, padahal dari pihak Puskesmas tidak mengetahui hal-hal teknis terkait PKH. Selama ada pencairan bantuan pun terdapat masalah seperti ada yang tidak bisa menarik uang bantuannya dan menurut ketua Puskesmas hal ini dikarenakan data ada yang offline sehingga harus berkoordinasi dengan pendamping PKH, namun pendampig dirasa lama dalam

menanggapi permasalahan tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi PKH terjadi karena belum optimalnya sumber daya manusia (SDM) pendamping PKH dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta terdapat pergantian pendamping PKH karena pendamping yang lama lalai dalam menjalankan tugasnya. Proses implementasi merupakan proses yang penting karena setelah diimplementasikan bisa dilihat kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Implementasi kebijakan tentunya bukanlah perihal mudah, mengingat banyaknya faktor yang dapat berpengaruh dalam keberlangsungannya. Program PKH memiliki tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memberikan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia, tetapi dengan kendala yang dialami pada implementasi PKH di Pekon Wonodadi mengakibatkan tujuan PKH belum tercapai dengan optimal. Dari permasalahan tersebut peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK

James E. Anderson dalam Widodo (2021) mendeskripsikan kebijakan publik sebagai perilaku yang bertujuan dan dilakukan oleh pelaku atau beberapa pelaku dalam menangani masalah atau permasalahan atau masalah yang menjadi perhatian. Selanjutnya Thomas R. Dye dalam Widodo (2021) menjelaskan jika kebijakan adalah apapun yang pemerintah yang ingin lakukan dan tidak dilakukan. Kemudian W.I Jenkins dalam Widodo (2021) menjelaskan jika kebijakan publik merupakan sejumlah keputusan yang diputuskan seorang aktor publik yang berfokus pada pencapaian tujuan pada situasi khusus. Dari beberapa definisi diatas, Anderson dalam Widodo (2021) menjelaskan beberapa aspek yang terdapat di kebijakan publik yaitu: 1. Memiliki tujuan yang akan dicapai 2. Mencakup aksi yang dilaksanakan pejabat pemerintah 3. Apapun yang dilaksanakan pemerintah dan serta apa yang tidak akan dilaksanakan pemerintah 4. Memiliki sifat positif dimana pemerintah mampu untuk melakukan sesuatu dan memiliki sifat negative dimana pemerintah tidak melaksanakan sesuatu 5. Kebijakan bersifat positif harus berdasarkan peraturan yang memiliki sifat mendesak.

Thomas R. Dye dalam Widodo (2021) untuk membuat kebijakan perlu melalui proses yang panjang, meliputi: 1. Identifikasi masalah Masalah diidentifikasi dengan menganalisis apa yang menjadi sumber permasalahan yang menjadi dasar aksi yang dilaksanakan pemerintah. 2. Penyusunan agenda (agenda setting) Tahap penyusunan adalah kegiatan yang berfokus pada pejabat pemerintahan dan media masa dalam memutuskan atas masalah publik. 3. Perumusan kebijakan (policy formulacy) Perumusan kebijakan merupakan tahap untuk mengusulkan rancangan kebijakan dengan melibatkan organisasi yang melakukan penyusunan usulan kebijakan. 4. Implementasi kebijakan (policy implementation) Implementasi kebijakan adalah tahap melaksanakan kebijakan dengan melibatkan segala sumber daya, sarana dan prasarana, dan aktivitas eksekutif yang terorganisir. 5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation) Evaluasi kebijakan adalah tahap yang dilakukan untuk melakukan penilaian kepada sebuah kebijakan yang sudah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan konsultan di luar pemerintah dan unsur masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah langkah yang menentukan proses kebijakan terlaksana dengan efektif karena implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terarah dari suatu

kebijakan yang berupaya untuk mengelola input, implementasi akan berjalan jika sudah ada penetapan tujuan sasaran, susunan program kegiatan, dan dana yang sudah siap untuk digunakan dalam mencapai sasaran. Wahab dalam Sahya (2012) implementasi kebijakan adalah faktor penting yang memuat keseluruhan proses kebijakan. Model implementasi kebijakan adalah kerangka analisis pada proses pelaksanaan kebijakan sebagai alat untuk menjelaskan keadaan yang ada setelah kebijakan tersebut ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa indikator saling t terhubung dan memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Berikut merupakan beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh ahli.

1. Model George C Edward III (1980) Edward dalam Subarsono (2012) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memiliki empat indikator yang mempengaruhi, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, 4) struktur birokrasi. 1) komunikasi dilakukan dengan menyampaikan tujuan dan sasaran kepada kelompok sasaran sehingga menurunkan kesalahan dan ketidaksesuaian saat implementasi. 2) sumber daya yang dalam implementasi dapat berupa sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana. 3) disposisi merupakan sikap dan karakter dari implementor seperti demokratisasi, jujur, dan komitmen. 4) struktur birokrasi yang memiliki tugas dalam proses pelaksanaan kebijakan sangatlah berpengaruh, salah satu aspek penting pada organisasi adalah adanya standar operational procedure (SOP).

2. Model Merilee S. Grindle (1980) Grindle dalam Subarsono (2012) menjelaskan bahwa terdapat dua indikator besaryang berpengaruh terhadap keberhasilan implementai, yaitu konten kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Indikator isi kebijakan meliputi 1) sebesar apa keperluan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, 2) jenis dan manfaat yang diterima kelompok sasaran, 3) sebesar apa perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan, 4) apakah letak program tepat, 5) apakah sebuah kebijakan sudah menjabarkan implementornya secara rinci, dan 6) apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai. Untuk indikator konteks kebijakan meliputi 1) sebesar apa kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki aktor dalam implementasi kebijakan, 2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

3. Model implementasi kebijakan Charles O Jones (1984) Jones (1984) dalam Rosita (2023) implementasi adalah kegiatan untuk menjalankan sebuah program yang memiliki tujuan tertentu. Menurut Jones (1984) implementasi kebijakan memiliki dari tiga pilar utama yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

a. Pilar organisasi

Pilar organisai adalah aktivitas yang dilakukan dengan membentuk struktur birokrasi, sumber daya dan metode dengan aktualisasi dan pengarahan suatu program dalam usahanya menjalankan rencana dan mencapai tujuan. Kegiatan organisasi ketika implementasi kebijakan berkaitan dengan penentuan unit kerja, pembagian tugas dari masing masing unit organisasi menjadi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi (Jones, 1984). Pilar organisasi disusun oleh beberapa indikator,i yaitu 1) sumber daya, 2) struktur organisasi atau unit-unit, 3) metode-metode. Sumber daya adalah aspek penting dalam pelaksanaan program karena bisa berpengaruh terhadap keberhasilan program. Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan pelaksana seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sumber daya finansial. Struktur organisasi adalah sistem formal dari aturan, tugas dan hubungan otoritas yang memberi pengawasan terhadap anggota organisasi bisa bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan (Jones, 1984). Metode-metode merupakan kegiatan

yang dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kebermanfaatan sumber dan aspek penentu bagi keberhasilan proses manajemen dengan menilik keberagaman dinamis dan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan.

b. Pilar interpretasi

Pilar interpretasi adalah aktivitas yang berupa penjabaran dan penjelasan dari pelaksana kepada kelompok sasaran memakai tutur kata yang mudah dimengerti dan dipahami, sehingga tidak ada kesalahan pemahaman dari maksud atau tujuan dari kebijakan dan tata cara pelaksanaannya. Pilar interpretasi bertujuan agar kebijakan bisa berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang diinginkan (Jones, 1984). c. Pilar aplikasi atau penerapan Pilar aplikasi berupa aktivitas yang merealisasikan kebijakan yang searah dengan rencana, pedoman, standar, dan tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan aplikasi harus memuat SOP yang jelas sehingga kebijakan dapat dijalankan sesuai jadwal. Prosedur kerja atau SOP juga dipakai untuk membantu pelaksana kebijakan tentang apa, apa tujuannya, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan (Jones, 1984).

KEMISKINAN

Menurut World Bank (1990) mendefinisikan kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dalam melunasi kebutuhan primer seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Johnson dan Schwartz dalam Assegaf (2015), kemiskinan adalah kondisi dimana kurangnya pendapatan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya Nugroho (1995) menjelaskan kemiskinan adalah kondisi dimana masyarakat dipahami berdasar pada kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dari beberapa definisi kemiskinan menurut ahli, dapat disimpulkan jika kemiskinan merupakan kondisi dimana suatu individu atau kelompok memiliki kemampuan yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan berdasarkan jenisnya yang terbagi ke dalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relative. Individu digolongkan dalam kemiskinan absolut jika pendapatan yang dihasilkan ada dibawah garis kemiskinan yang ditentukan. Sedangkan individu digolongkan miskin relative jika orang tersebut merupakan orang miskin tetapi masih ada dibawah garis kemampuan masyarakat umumnya. Kemiskinan juga bisa digolongkan dari penyebabnya yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan structural. Kemiskinan kultural yang disebabkan oleh perilaku orang atau sekelompok orang yang tidak mau merubah taraf hidupnya dengan berusaha. Kemiskinan struktural disebabkan karena sistem pembangunan yang kurang merata di seluruh wilayah atau karena rekayasa manusia.

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan sosial dengan syarat kepada keluarga atau perorangan miskin dan rentan yang terdapat dalam daftar data terpadu program penanganan fakir miskin. PKH memiliki tujuan untuk menurunkan dan menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki tingkah laku yang tidak mendukung naiknya angka kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH, kriteria KPM PKH meliputi:

1. Ibu hamil/menyusui;
2. Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun;
3. Anak Sekolah Dasar sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Atas Sederajat;
4. Anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;

5. Lanjut usia mulai dari 60 tahun; dan 6. Penyandang disabilitas

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian enelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan tipe deskriptif. Menurut Bogdan & Taylor dalam Farida (2014) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan data deskriptif berupa susunan kata dari responden dan tingkah laku yang diamati. Sugiyono (2017) mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang terkait dengan data yang bukan angka dan bersifat naratif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi program PKH di Pekon Wonodadi secara rinci, nyata dan akurat tentang fakta dan fenomena secara detail yang didapatkan dari informan. Fokus penelitian ini terkait dengan model implementasi Charles O Jones (1984) dalam Rosita (2023) yang akan melihat implementasi program PKH di Pekon Wonodadi dengan pilar organisasi, pilar interpretasi, dan pilar aplikasi atau penerapan.

D. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

PKH ialah program sistensi sosial yang diberikan kepada rumah tangga yang sesuai dengan kualifikasi tertentu dengan persyaratan yang bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku masyarakat miskin. Program ini memiliki tujuan untuk menekan angka dan menanggulangi kemiskinan, memberikan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki tingkah laku yang tidak mendukung meningkatnya kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Pada bab ini, peneliti menjabarkan hasil penelitian sesuai dengan teori implementasi Charles O Jones (1984) dalam Rosita (2023) yang terdiri dari tiga indikator yaitu pilar organisasi, pilar interpretasi, dan pilar aplikasi. .

Pilar Organisasi

Pilar organisasi adalah aktivitas yang berupaya untuk membuat susunan organisasi/birokrasi, sumber daya dan metode dalam menjalankan dan membimbing sebuah program supaya berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Organisasi bertujuan untuk mnjelaskan dan melaksanakan program yang direncanakan. Begitu juga dengan program PKH yang dalam pelaksanaannya harus ada struktur pelaksana agar mempermudah pelaksanaan program PKH dengan optimal. Jones (1984) pilar organisasi memiliki beberapa indikator, yaitu sumber daya, struktur organisasi, dan metode-metode.

a. Sumber daya

Sumber daya adalah salah satu aspek penting pada implementasi program atau kebijakan, sebab sumber daya dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan program. Sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program berupa sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya finansial.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah manusia yang melakukan pekerjaan atau menjadi bagian dari sebuah birokrasi/organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain lain. Dalam penelitian yang didapatkan di implementasi program PKH di Pekon Wonodadi, terdapat beberapa sumber daya manusia yang terlibat. Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan PKH, sumber daya manusia yang terlibat dalam PKH di tingkat daerah Kabupaten/Kota adalah dinas sosial yang dibantu oleh koordinator Kabupaten/Kota dalam mengelola sumber daya manusia PKH di tingkat Kabupaten/Kota, dan menilai kinerja pendamping sosial. Untuk pelaksana PKH di Kecamatan dan pekon adalah pendamping sosial yang memiliki tugas melaksanakan pendampingan kepada KPM yang ada di kelurahan/desa.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH Pekon Wonodadi, pendamping korcam Gadingrejo, ketua Puskesmas, dan Kasi Kesra sumber daya manusia yang terlibat yaitu kepala desa, Kasi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dusun, dan ketua Puskesmas. Kemudian berdasarkan wawancara dengan pendamping Koordinator Kecamatan Gadingrejo (Korcam) terdapat kendala dalam sumber daya manusia pelaksana PKH Pekon Wonodadi, yaitu terdapat pergantian pendamping pada tahun 2022 dan 2023. Pergantian tersebut disebabkan karena pendamping yang lalai dengan tugasnya sehingga diberikan surat peringatan untuk mengundurkan diri sehingga digantikan dengan pendamping yang sekarang. mengundurkan diri sehingga digantikan dengan pendamping yang sekarang. Berdasarkan wawancara yang didapatkan dari pendamping Korcam Gadingrejo untuk pendamping PKH Pekon Wondadi yang sekarang juga kurang bertanggung jawab dengan tugasnya karena belum pernah mengadakan pertemuan rutin untuk KPM. Kemudian berdasarkan wawancara dengan pendamping pekon Wonodadi, pendamping baru mengadakan pertemuan rutin pada tanggal 22 Agustus 2023. Selain itu, berdasarkan wawancara dari ketua Puskesmas Pekon Wonodadi dan selaku operator data Pekon Wonodadi, pendamping PKH Pekon Wonodadi sulit untuk dihubungi jika terdapat permasalahan data KPM yang offline sehingga menyebabkan terhambatnya bantuan KPM. Jika mengacu kepada regulasi PKH yaitu Permensos Nomor 1 Tahun 2018, sumber daya manusia yang terlibat yaitu pendamping sosial, aparat pekon tidak termasuk sumber daya manusia yang terlibat. Tetapi menurut informasi dari pendamping korcam Gadingrejo, aparat pekon juga memiliki peran penting dalam melaksanakan PKH karena aparat pekon yang mengetahui kondisi warganya di Pekon. Tetapi menurut pendamping Korcam Gadingrejo juga, aparat pekon kurang mensosialisasikan program ini kepada KPM terkait KPM yang sudah lama mendapatkan bantuan dan sudah mengalami peningkatan kemampuan ekonomi tetapi tidak mau mundur sebagai KPM dan kurang koordinasi dengan pendamping PKH pekon Wonodadi.

2. Sumber daya finansial

Sumber daya finansial berupa aset atau dana yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi yang berupa uang, tabungan atau investasi. Sumber daya finansial yang digunakan pada pelaksanaan program PKH di Pekon Wonodadi berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH pekon Wonodadi adalah menggunakan APBN untuk dana bantuan yang akan diberikan ke KPM. Bantuan tersebut dicairkan sebanyak 3 bulan sekali dengan dasar SP2D PKH dan langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan. Kemudian terdapat dana Bantuan Operasional (BOP) pendamping yang berasal dari APBD dan diberikan sebanyak 6 bulan sekali untuk pendamping Akan tetapi berdasarkan informasi dari pendamping Korcam Gadingrejo BOP ini berjumlah sekitar 4-5 juta, tetapi seiring berjalannya waktu BOP semakin berkurang dikarenakan perubahan kebijakan dari Pemerintah. Untuk pendamping juga tidak ada uang pengganti yang diberikan jika dalam kegiatan PKH uang pribadi pendamping digunakan untuk membantu kegiatan PKH. Kemudian Sumber daya finansial yang digunakan untuk pertemuan rutin menggunakan dana iuran perkelompok sejumlah 2 ribu per orang dan diberikan sebulan sekali. Iuran ini bertujuan agar tidak memberatkan tuan rumah yang menjadi tempat pertemuan rutin. Tetapi untuk iuran ini tidak semua kelompok melaksanakan iuran, kelompok yang tidak melaksanakan iuran berasal dari kelompok dusun 6 dan 7.

3. Sarana dan prasarana

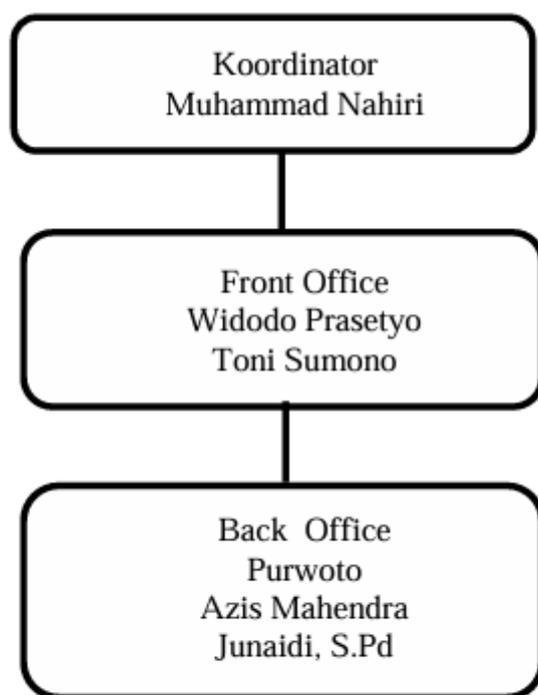
Sarana dan prasarana berupa fasilitas fisik yang dimanfaatkan dalam mendukung berbagai aktivitas dan kegiatan manusia. Sarana dan prasarana yang dipakai dalam pelaksanaan program PKH Pekon Wonodadi berdasarkan wawancara dengan

pendamping PKH Pekon Wonodadi adalah menggunakan rumah ketua KPM agar mengetahui kondisi langsung KPM di Pekon Wonodadi. Tetapi ada keluhan yang disampaikan oleh salah satu ketua KPM karena kalau pertemuan dirumah dirasa tempatnya kurang leluasa sehingga tidak banyak anggota kelompoknya yang hadir sehingga menyarankan untuk melakukan pertemuan rutin di balai Pekon. Dari pihak pekon juga siap untuk memfasilitasi jika ingin menggunakan balai pekon sebagai tempat pertemuan. Berikut adalah dokumentasi yang memperlihatkan ruangan yang digunakan untuk kegiatan P2K2.

Kemudian berdasarkan informasi dari pendamping Korcam Gadingrejo, salah satu kekurangan sarana adalah tidak adanya Proyektor untuk digunakan dalam kegiatan P2K2 di seluruh Pekon Kecamatan Gadingrejo. Jika menggunakan proyektor maka proses penyampaian informasi akan lebih jelas karena dalam pemberian materi terdapat video video dan slide presentasi. Dikarenakan tidak adanya proyektor maka hanya menggunakan komunikasi dua arah yaitu pendamping menyampaikan informasi lalu akan ada sesi tanya jawab. Tetapi dengan sistem tersebut tidak terlalu efektif karena dalam penyampaian informasi para KPM tidak selalu aktif untuk bertanya.

b. Struktur Organisasi

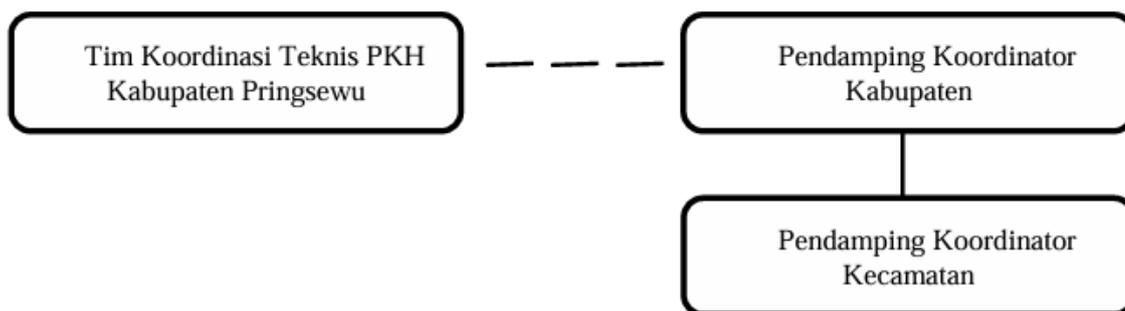
Jones mengartikan struktur organisasi sebagai sistem formal dari aturan, tugas dan hubungan otoritas yang memberikan pengawasan terhadap cara anggota organisasi melakukan kerja sama dan memanfaatkan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan dari kebijakan yang diinginkan (Jones, 1984). Berdasarkan hasil penelitian tidak ada tim teknis pelaksana PKH di tingkat pekon, tetapi ada lembaga Puskesmas yang membantu dalam permasalahan sosial salah satunya terkait dengan bantuan PKH. Berikut adalah struktur Puskesmas pekon wonodadi:



Gambar 3 Struktur Puskesmas Pekon Wonodadi

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil penelitian Puskesmas memang menjadi sarana warga untuk menyampaikan permasalahan sosial salah satunya adalah PKH. Untuk anggota di Puskesmas cukup aktif jika menanggapi permasalahan sosial warga. Dalam pembagian tugas biasanya ketua Puskesmas melaksanakan tugasnya dengan turun ke lapangan bersama dengan anggota agar mengefisienkan pekerjaan. Tetapi menurut beliau Puskesmas di Pekon Wonodadi masih memiliki kekurangan dalam hal Sarana dan prasarana yang belum memadai karena belum memiliki kantor tersendiri sehingga harus menumpang di ruangan kosong balai Pekon. Kemudian untuk kelembagaan PKH yang terdekat dari tingkat pekon ada pada Tim Koordinasi Teknis PKH Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksana PKH Kecamatan yang dikoordinatori oleh pendamping yang berperan sebagai Koordinator Kecamatan. Berikut ini adalah alur koordinasi dalam pelaksanaan PKH di pekon Wonodadi:



Gambar 4 Struktur Pelaksanaan PKH

Sumber: Diolah peneliti, 2023

c. Metode-metode

Metode adalah proses aktivitas yang dijalankan untuk memberikan peningkatan terhadap kebermanfaatan sumber dan aspek yang menjadi penentu keberhasilan proses manajemen dengan menilik keberagaman dinamis dan manfaat organisasi untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian metode yang digunakan yaitu koordinasi bersama pendamping PKH, aparat pekon, dan ketua Puskesmas untuk memverifikasi warga yang layak mendapatkan bantuan PKH. Selain itu juga pendamping menggunakan grup whatsapp untuk menyebarkan informasi-informasi terkait kegiatan PKH. Metode selanjutnya yaitu dengan mengadakan rapat bulanan pendamping untuk mengevaluasi kegiatan PKH dan juga dengan memberikan edukasi mengenai modul-modul PKH selama mengadakan pertemuan rutin, selama pertemuan rutin juga pendamping mengingatkan kepada KPM mengenai kewajiban sebagai KPM dan graduasi.

PILAR INTERPRETASI

Pilar interpretasi adalah aktivitas yang berupa penjabaran kepada implementor dan kelompok sasaran dengan memakai tutur kata yang mudah dimengerti supaya dapat dipahami dengan mudah maksud dan tujuan dari kebijakan dan tata cara pelaksanaannya. Pilar interpretasi bertujuan agar kebijakan bisa berjalan tujuan dan sasaran yang diinginkan (Jones,1984). Berdasarkan hasil penelitian interpretasi yang digunakan yaitu dengan menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat terutama dengan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pola pikir melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang akan dijelaskan terkait modul di bidang ekonomi, edukasi, pengasuhan anak, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.

Dari hasil penelitian juga terdapat kendala yang disampaikan oleh masyarakat terkait kegiatan P2K2 yang terhambat karena terdapat pergantian pendamping. Dengan pendamping

yang lama pertemuan hanya dilakukan sekali di balai pekon dan hanya dihadiri oleh ketua kelompok saja, setelah berganti ke pendamping yang sekarang pertemuan baru dilakukan sekali pada bulan Agustus 2023. Menurut informasi dari pendamping korcam, jika pendamping PKH pekon tidak bisa hadir kegiatan P2K2 maka tidak bisa digantikan dengan pendamping pekon lain. Hal ini dikarenakan masing-masing pendamping sudah memiliki tanggung jawab di pekon masing-masing. Kemudian menurut informasi dari pendamping PKH pekon Wonodadi, permasalahan yang dihadapi oleh pendamping adalah keawaman KPM yang tidak bisa mencerna penyampaian yang diberikan dengan cepat.

PILAR APLIKASI ATAU PENERAPAN

Pilar aplikasi adalah kegiatan yang merealisasikan kebijakan yang searah dengan rencana, pedoman, standar, dan tujuan yang sesuai harapan. Kegiatan aplikasi harus mencantumkan SOP yang konkret, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal. Prosedur kerja atau SOP juga digunakan untuk membantu pelaksana kebijakan tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan (Jones, 1984). Berdasarkan hasil penelitian SOP yang digunakan dalam pelaksanaan PKH yaitu mengacu pada Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dan Paduan Pelaksanaan PKH. Untuk pendamping PKH pekon juga memiliki jadwal kegiatan pendamping sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan P2K2 dan juga laporan bulanan pendamping sebagai bentuk pelaporan selama melaksanakan tugasnya.

E. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil didapat dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pilar Organisasi, pada pilar organisasi sudah sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Seperti masih terdapat kurangnya tanggung jawab pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya koordinasi antara aparat pekon, Puskesmas, dan pendamping PKH. selain itu juga masih terdapat kekurangan dalam sarana untuk menunjang kegiatan P2K2.
- 2) Pilar interpretasi, pada pilar interpretasi memang sudah sesuai dengan regulasi terkait PKH yaitu untuk menjelaskan maksud dan tujuan program, tetapi masih terdapat kekurangan pada pilar interpretasi seperti tingkat pemahaman masyarakat yang tidak bisa langsung memahami informasi yang disampaikan. Selain itu juga terdapat 2 kali pergantian pendamping yang menyebabkan kegiatan P2K2 terhambat dan juga pendamping yang sekarang baru mengadakan P2K2 sekali selama menjadi pendamping.
- 3) Pilar aplikasi atau penerapan, pada pilar aplikasi atau penerapan sudah berjalan sesuai dengan regulasi PKH terutama terkait SOP program. SOP PKH di Pekon Wonodadi sudah mengikuti alur mulai dari pendaftaran KPM sampai dengan graduasi KPM. Kemudian untuk pendamping juga memiliki jadwal kegiatan dan membuat laporan bulanan pendamping. Hanya saja jadwal kegiatan tersebut baru mulai berjalan pada Agustus 2023, sebelum waktu tersebut tidak pernah diadakan pertemuan bulanan oleh pendamping. Hal itu disebabkan karena pendamping harus menyortir banyak KPM baru sehingga menghambat kegiatan P2K2.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Pendamping PKH dan aparatur pekon diharapkan intens dalam berkoordinasi untuk mensosialisasikan kepada KPM yang sudah lama menjadi KPM dan sudah mampu secara finansial untuk mengundurkan diri dari PKH, kemudian pendamping PKH diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya dan diharapkan bisa untuk memenuhi sarana yang bisa menunjang kegiatan P2K2.
2. Diperlukan dukungan finansial untuk menunjang prasarana yang digunakan dalam kegiatan PKH seperti proyektor, pengeras suara, ATK dll. Dengan tercukupinya prasarana dapat memaksimalkan dalam pelaksanaan PKH.
3. Memberikan reward kepada KPM yang akan graduasi mandiri seperti bantuan dana usaha, sehingga KPM yang sudah dianggap mampu termotivasi untuk graduasi secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dicky. (2020). Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daalm Rangka Memberikan Pelayanan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 3(2), 348-355
- Hendra Roy. 2010. Determinan Kemiskinan. Universitas Indonesia:Jakarta.
- Kemensos RI. 2021. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial: Jakarta.
- Nugrahani, Farida., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., ... & Nugraha, N. A. (2021). Ekonomi Pembangunan. Yayasan Kita Menulis.
- Rokhoul Akhmad. (2010). Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Rosita Dela. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.
- Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- TNP2K. 2011. PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan: Jakarta Pusat.
- Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative: Malang.

Sumber Lain:

Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.